LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada K/L/D/I perlu dilakukan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. bahwa diperlukan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pelaksanaan penilaian kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

jdih.lkpp.go.id

kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. merumuskan Indikator Kinerja Kunci untuk Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. melakukan pembobotan Indikator Kinerja Kunci untuk Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
c. mengimplementasikan hasil penilaian kinerja pada sistem Monev Online.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2016.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

jdih.lkpp.go.id

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:
1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 70 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo	750.000
			2. Sarah Sadiqa	750.000
2.	Ketua	:	Sutan Suangkupon Lubis	650.000
3.	Anggota	:	1. Setyanto Putro	500.000
			2. M. Iskandarsyah	500.000
			3. Ari Sulindra	500.000
			4. Himawan Giri Dahlan	500.000
			5. Tito Sulistyo	500.000
			6. Dara Kumala Arumbuana	500.000
			7. Eva Nurdinna Agustini	500.000
			8. Biantri Raynasari	500.000
			9. Frans Yoenero	500.000
			10. M. Yusuf Chandra Nugraha	500.000
			11. Eva Ayuga Ningrum	500.000
			12. Mahfuzan Zakaria	500.000
			13. Fanni Sufiandi	500.000
			14. Tjipto Prasetyo	500.000
			15. Hafiz Ashady	500.000
			16. Arif Budiman	500.000
			17. Selamet Budiharto	500.000
			18. Andy Martanto	500.000
			19. Jhon Piter Halomoan	500.000
			20. Imam Arumsyah	500.000
			21. Erwin Sondang	500.000
			22. Patria Susantosa	500.000
			23. Januar Indra	500.000
			24. Dwi Satrianto	500.000
			25. Muhammad Firdaus	500.000
			26. Yohana Surat Payon	500.000
			27. Raden Ari Widianto	500.000
			28. Eko Rinaldo Octavianus	500.000

jdih.lkpp.go.id

			29. Januar Nur Hidayanto (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan)	500.000
			30. Budi Rinaldi (Kasie Sistem Informasi Keuangan daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

jdih.lkpp.go.id